BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025







karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Manado, 31 Desember 2025
Kepala BKHIT Sulawesi Utara

Agus Mugiyanto
NIP. 196902271992031002

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan Laporan		iv
I	Laporan Realisasi Anggaran	1
II	Neraca	2
III	Laporan Operasional	5
IV	Laporan Perubahan Ekuitas	8
V	Catatan Atas Laporan Keuangan	
A.	Penjelasan Umum	11
A.1	Profil dan Kebijakan Teknis	13
A.2	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.3	Basis Akuntansi	14
A.4	Dasar Pengukuran	14
A.5	Kebijakan Akuntansi	14
B.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1	Pendapatan	19
B1.1	Penerimaan Pajak	20
B.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	20
B.2	Belanja	21
B.2.1	Belanja Pegawai	21
B.2.2	Belanja Barang	22
B.2.3	Belanja Modal	23
C.	Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	25
C.1	Aset Lancar	26
C.2	Aset Tetap	28
C.3	Aset Lainnya	30
C.4	Kewajiban Jangka Pendek	32
C.5	Ekuitas	33
C.6	Catatan Penting Lainnya Neraca	33
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	34
D.2	Beban Pegawai	34
D.3	Beban Persediaan	35
D.4	Beban Barang dan Jasa	35
D.5	Beban Pemeliharaan	36
D.6	Beban Perjalanan Dinas	36
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.8	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	37
E.2	Surplus (Defisit) LO	37
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	37
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	37
E.5	Transaksi Antar Entitas	39
E.6	Ekuitas Akhir	40
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	40
F.2	Pengungkapan Lain-lain	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Semester II yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 unaudited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, 31 Desember 2025
Kepala BKHIT Sulawesi Utara

Agus Mugiyanto
NIP 196912271992031002

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.515.012.338,00 atau mencapai 46,46% dari estimasi Pendapatan- LRA sebesar Rp3.261.130.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp.14.260.074.536,00 atau mencapai 87,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp.16.350.479.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.491.407.243,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp205.453.864,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp25.285.953.379,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp510.000,00 dan Rp25.490.897.243,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.514.997.338,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp15.787.160,076,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.304.464,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-14.281.467.202,00Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp-14.281.467.202,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar R p 26.677.072.787,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14.28.467.202,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.095.291.658,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp 25.490.897.243,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**3,261,130,000**	**1,515,012,338**	**(1,746,117,662)**	**46.46**	**3,191,130,000**	**1,865,194,769**	**(1,325,935,231)**	**58.45**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,261,130,000	1,515,012,338	(1,746,117,662)	46.46	3,191,130,000	1,865,194,769	(1,325,935,231)	58.45
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**3,261,130,000**	**1,515,012,338**	**(1,746,117,662)**	**46.46**	**3,191,130,000**	**1,865,194,769**	**(1,325,935,231)**	**58.45**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	16,350,479,000	14,260,074,536	(2,090,404,464)	87.22	16,641,318,000	16,318,247,044	(323,070,956)	98.06
1. Belanja Pegawai	6,849,046,000	6,805,609,482	(43,436,518)	99.37	6,311,051,000	6,277,286,614	(33,764,386)	99.46
2. Belanja Barang	9,501,433,000	7,454,465,054	(2,046,967,946)	78.46	10,169,767,000	9,880,463,325	(289,303,675)	97.16
3. Belanja Modal	0	0	0	0	160,500,000	160,497,105	(2,895)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**16,350,479,000**	**14,260,074,536**	**(2,090,404,464)**	**87.22**	**16,641,318,000**	**16,318,247,044**	**(323,070,956)**	**98.06**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Manado, 31 Desember 2025
Kepala BKHIT Sulawesi Utara

Agus Mugiyanto
NIP. 196902271992031002

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

NERACA

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

NERACA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	15,000	(15,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(75)	75	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	14,925	(14,925)	(100.00)
Persediaan	205,453,864	9,304,464	196,149,400	2,108.12
JUMLAH ASET LANCAR	**205,453,864**	**9,319,389**	**196,134,475**	**2,104.59**
ASET TETAP				
Tanah	11,460,619,400	11,460,619,400	0	0.00
Peralatan dan Mesin	17,260,797,043	17,359,342,189	(98,545,146)	(0.57)
Gedung dan Bangunan	14,889,758,388	14,739,908,388	149,850,000	1.02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	521,501,500	521,501,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18,846,722,952)	(17,412,549,279)	(1,434,173,673)	8.24
JUMLAH ASET TETAP	**25,285,953,379**	**26,668,822,198**	**(1,382,868,819)**	**(5.19)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	49,500,000	49,500,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	40,180,000	(40,180,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	330,501,546	654,000	329,847,546	50,435.40
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(380,001,546)	(50,154,000)	(329,847,546)	657.67
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**40,180,000**	**(40,180,000)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**25,491,407,243**	**26,718,321,587**	**(1,226,914,344)**	**(4.59)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	510,000	41,248,800	(40,738,800)	(98.76)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**510,000**	**41,248,800**	**(40,738,800)**	**(98.76)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**510,000**	**41,248,800**	**(40,738,800)**	**(98.76)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,490,897,243	26,677,072,787	(1,186,175,544)	(4.45)
JUMLAH EKUITAS	**25,490,897,243**	**26,677,072,787**	**(1,186,175,544)**	**(4.45)**
JUMLAH EKUITAS	**25,490,897,243**	**26,677,072,787**	**(1,186,175,544)**	**(4.45)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**25,491,407,243**	**26,718,321,587**	**(1,226,914,344)**	**(4.59)**

Manado, 31 Desember 2025
Kepala BKHIT Sulawesi Utara

Agus Tugiyanto
NIP 196901271992031002

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.514.997.338	1.865.209.769
Jumlah Pendapatan		**1.514.997.338**	**1.865.209.769**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	6.805.609.482	6.277.286.614
Beban Persediaan	D.2.3	131.776.592	321.700.904
Beban Barang dan Jasa	D.2.4	4.497.065.271	5.247.997.293
Beban Pemeliharaan	D.2.5	1.100.625.410	1.691.447.913
Beban Perjalanan Dinas	D.2.6	1.588.670.237	2.593.073.018
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	1.663.413.159	928.210.516
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	(75)	75
Jumlah Beban		**15.787.160.076**	**17.059.716.333**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(14.272.162.738)**	**(15.194.506.564)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.3.1	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**-**	**-**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(14.281.467.202)**	**(15.194.506.564)**
Pos Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(14.281.467.202)**	**(15.194.506.564)**

Manado, 31 Desember 2025
Kepala UKPIT Sulawesi Utara

Agus Mugiyanto
NIP. 19691227199203100 2

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

AUDITED

karantinasulut@karantinaindonesia.go.id

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**26.677.072.787**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(14,281,467,202)**	**-6.141.948.076**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**0,00**	**0,00**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**-**
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-
Jumlah		**-**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	13.095.291.658	41.871.579.351
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,186.175.544)	26.677.072.787
EKUITAS AKHIR	E.6	**25.490.897.243**	**26.677.072.787**

Manado, 31 Desember 2025
Kepala BKHIT Sulawesi Utara

Agus Mugiyanto
NIP. 19690[illegible]271992031002

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKHNIS BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

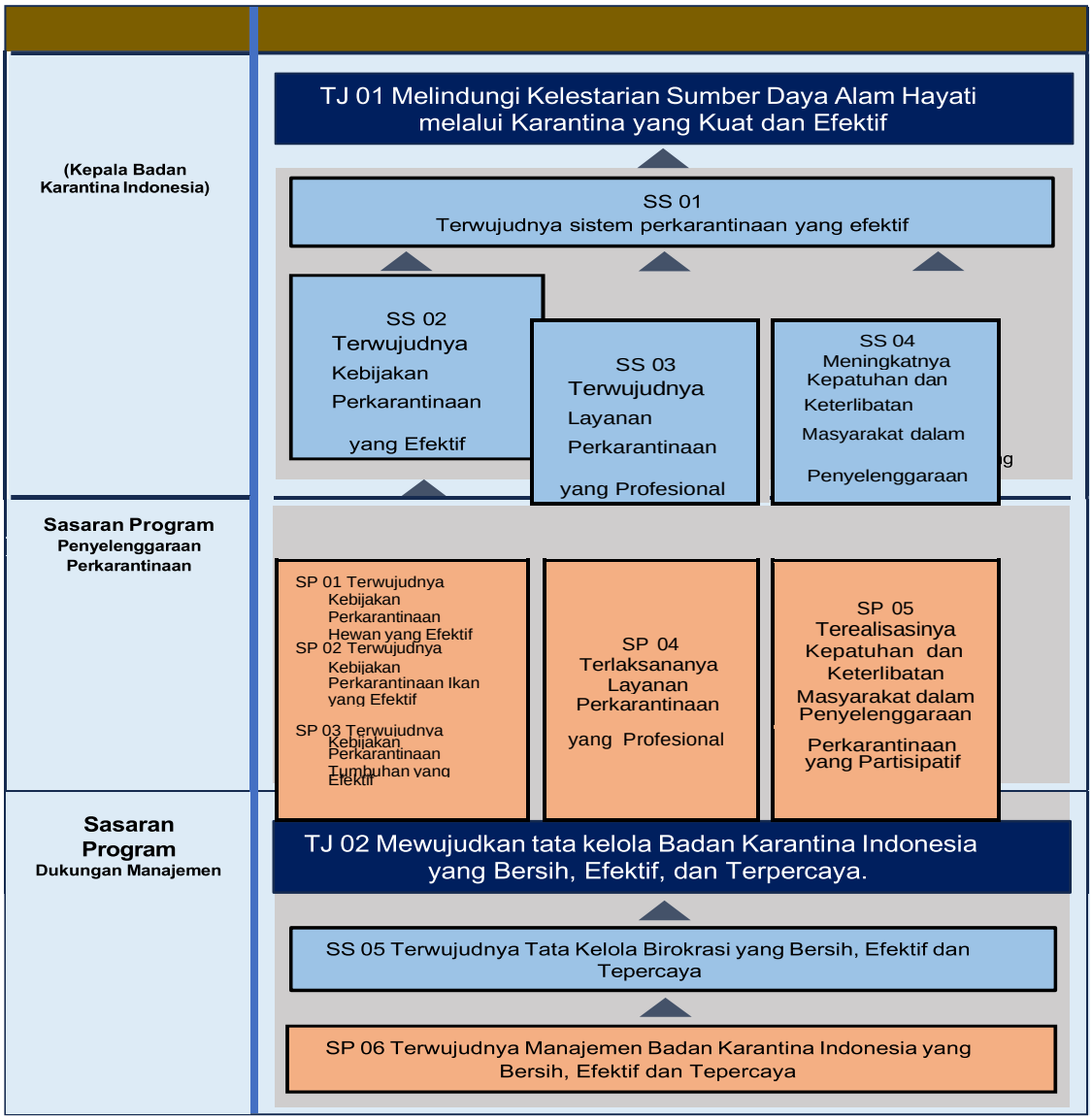
Visi BBKHIT Sulawesi Utara mengikuti Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yakni: “Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya

Tujuan BKHIT Sulawesi Utara Tujuan BBKHIT Sumatera Utara 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK d di tempat pemasukan dan / atau pengeluaran	3 Jenis
		Jumlah media membawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat di bebaskan	4000 sertifikat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah media pembawa melalui tempatpengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1.300 sertifikat
2	Terealisasi nya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkaraantin hewan, ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	27 Dokumen
		Jumlah kasus penyelenggaran perkarantinaan yang dapat selesai (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya Layanan humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya Layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara	81 Nilai
5	Terwujudnya tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara Darussalam.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUTANSI

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utaramenerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utaradalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 KEBIJAKAN AKUTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi- konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara Darussalam. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utaraadalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
- harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajibanban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Rincian Pagu Anggaran dan Anggaran Setelah Revisi TA. 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.515.012.338	-
Jumlah Pendapatan	**1.515.012.338**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	7.099.529.000	6.849.046.000
Belanja Barang	10.524.715.000	9.501.433.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**17.624.244.000**	**16.350.479.000**

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.515.012.338,00 atau mencapai 46,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.261.130.000,00 Pendapatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan karantina sepanjang Tahun 2025, terdapat sejumlah faktor strategis maupun teknis yang mempengaruhi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perlu ditegaskan bahwa tidak tercapainya target tersebut bukan disebabkan oleh penurunan kualitas kinerja pelayanan, melainkan merupakan dampak dari dinamika eksternal, kondisi pasar, serta kebijakan pemerintah yang berlaku tahun berjalan. Target PNPB BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025 adalah : Rp3.261.130.000,00 Namun hingga akhir tahun 2025 baru mencapai Rp1.515.012.338,00 Adapun faktor-faktor yang memengaruhi capaian PNBP adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Volume Lalu Lintas Komoditas

   Sepanjang tahun 2025 terjadi penurunan signifikan pada volume ekspor, impor, dan antar area, termasuk pada beberapa komoditas unggulan Sulawesi Utara. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain:
   Lesunya permintaan pasar global, terutama dari negara-negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok, Eropa, dan Amerika.
   Penyesuaian produksi oleh pelaku usaha, terutama sektor perkebunan dan perikanan, akibat biaya operasional yang meningkat dan ketersediaan bahan baku yang tidak stabil.
   Fluktuasi harga komoditas strategis, seperti pala, kelapa, dan hasil perikanan, yang menyebabkan pelaku usaha menunda atau mengurangi pengiriman.
   Penurunan volume ini secara langsung berdampak pada menurunnya permohonan layanan karantina, yang menjadi komponen utama perhitungan PNBP.

2. Perubahan Pola Pengiriman oleh Pelaku Usaha

   Beberapa eksportir dan pelaku usaha domestik mengubah strategi logistik mereka dari yang sebelumnya melakukan pengiriman dalam jumlah kecil dengan frekuensi tinggi, menjadi pengiriman dalam jumlah besar namun lebih jarang. Perubahan pola ini berdampak pada:
   Berkurangnya jumlah permohonan layanan yang dikenakan tarif PNBP, meskipun volume barang yang dikirim tetap atau bahkan meningkat.
   Menurunnya frekuensi tindakan karantina, seperti pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, atau tindakanlaboratorium, yangpadatahun-tahunsebelumnyamenjadisumber penerimaan PNBP.
   Dengan frekuensi layanan yang lebih sedikit, maka akumulasi PNBP menjadi lebih rendah dibandingkan proyeksi awal.

3. Tarif 0 Rupiah untuk Komoditas Ikan dan Produk Turunannya Antar Area

   Salah satu komoditas dengan lalu lintas tertinggi di Sulawesi Utara adalah ikan dan produk perikanan, khususnya antar area. Namun demikian, sesuai ketentuan tarif layanan karantina, komoditasikandanprodukturunannyayangdilalulintaskanantar areadikenakantarif 0 (nol). Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah:
   Meskipun frekuensi sertifikasi dan lalu lintas komoditas perikanan sangat tinggi, layanan ini tidak memberikan kontribusi langsung terhadap PNBP, karena seluruh proses sertifikasi dan pemeriksaan dilakukan tanpa pungutan.
   Di beberapa minggu atau bulan tertentu, lebih dari separuh total permohonan layanan yang diproses balai berasal dari komoditas perikanan antar area. Namuntingginyavolume tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan, karena tidak terdapat tarif yang dapat dipungut. Dengan demikian, dominasi layanan tanpa tarif ini memberi pengaruh signifikan terhadap rendahnya capaian PNBP tahun 2025.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, tidak tercapainya target PNBP Tahun 2025 pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan dampak dari penurunan lalu lintas komoditas, perubahanpolapengiriman, sertakebijakantariflayanan, khususnyapadakomoditas perikanan antar areayang dikenakan tarif 0. Faktor-faktor tersebutberada di luar kendali pelaksana teknis, namun telah dihadapi melalui optimalisasi pelayanan dan efisiensi proses operasional.

B.1.1.Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA. 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	**-**	**-**

B.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi	2.429.268	1.511.920	37,76
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	28.517.000	28.517.000	51,12
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.121.746.069	1.286.909.357	-14,72
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	139.615.000	19,840,000	85,78
Pendapatan Jasa Lainnya	222.705.001	498.400.000	62,02
Jumlah	**1.515.012.338**	**1.835.178.277**	**18,79**

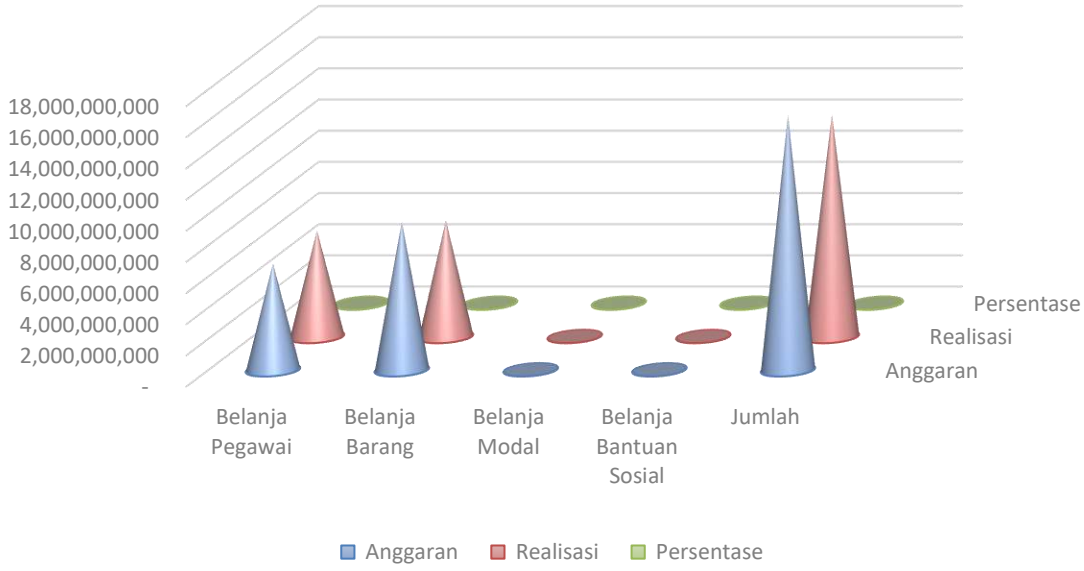
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp14.260.074.536,00 atau 87,22% dari anggaran belanja sebesar Rp 16.318.247.044,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	6,849,046,000	6,805,609,482	99.37
Belanja Barang	9,501,433,000	7,454,465,054	78.46
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16,350,479,000	14,260,074,536	88.92

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dalam Grafik berikut ini :



B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp6.805.609.482,00 dan Rp6.277.286.614,00.
Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan pangkat sebanyak 12 (dua belas) orang, Kenaikan Gaji Brekala 48 (empat puluh delapan), perubahan status kawin 5(lima).

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.004.985.620	3.347.610.100	16,41
Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.161	57.420	11,8
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	251.754.910	227.560.930	9,61
Belanja Tunj. Anak PNS	76.233.196	69.040.952	9,43
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	21.600.000	14,28
Belanja Tunj. Fungsional PNS	474.327.000	433.754.000	8,55
Belanja Tunj. PPh PNS	29.495.425	28.929.370	1,91
Belanja Tunj. Beras PNS	207.483.300	180.905.160	12,80
Belanja Uang Makan PNS	648.234.000	493.907.000	23,80
Belanja Tunjangan Umum PNS	56.305.000	16.445.000	70,79
Beban Gaji Pokok PPPK	458.387.900	321.571.800	29,84
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.348	6.628	9,79
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	38.140.180	31.403.730	17,6
Beban Tunjangan Anak PPPK	13.902.782	10.746.984	22,69
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	37.570.000	34.260.000	8,81
Beban Tunjangan Beras PPPK	41.496.660	31.647.540	23,73
Beban Uang Makan PPPK	100.566.000	60.201.000	40,13
Belanja Uang Lembur	278.659.000	940.267.000	-237,4
Belanja Uang Lembur PPPK	55.716.000	27.372.000	50,87
Jumlah Belanja kotor	**6.805.609.482**	**6.277.286.614**	**7,76**
Pengembalian Belanja Pegawai	0	1.637	-
Jumlah Belanja	**3.267.519.330**	**3.056.308.294**	**6,46**

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.454.465.054,00 dan Rp9.880.463.325,00 belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	2.363.797.819	3.175.630.690	-34,34
Belanja Barang Non Operasional	395.268.811	277.356.150	29,83
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	267.545.336	321.700.904	-20,24
Belanja Jasa	1.738.557.441	1.821.254.650	-4,75
Belanja Pemeliharaan	1.100.625.410	1.691.447.913	-53,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.588.670.237	2.593.073.018	-63,22
Jumlah Belanja Kotor	**7.454.465.054**	**9.880.463.325**	**-32,54**
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	**7.454.465.054**	**9.880.463.325**	**-32,54**

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp160,497.105,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	160.497.105	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	160.497.105	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**160.497.105**	**-**

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp160.497.105,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 tidak mengalamai kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024

B.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 tidak mengalamai kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024

B.2.4 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025, dan untuk Belanja modal tiadakan dalam pelaksanaan DIPA TA. 2025

B.2.4.1 Laporan Kinerja

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 pada Badan Karantina Indonesia sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	:	(127) – Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi	:	(01)Badan Karantina Indonesia
Satker	:	(690893) Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Sulawesi Utara
Fungsi	:	(04) Ekonomi
Sub Fungsi	:	(04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan)
Lokasi	:	Sulawesi Utara

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
501	Hasil Pemantauan	773.853.000	251.443.966	100	3	Produk	3	1	
502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	1.680.108.000	1.547.220.815	100	41.300	Sertifikat	41.300	1	
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	154.594.000	109.524.701	100					
601	Pengawasan dan Pengendalian Karantina	154.594.000	109.524.701	100	1	Laporan	1	1	
956	Layanan BMN	4.530.000	4.380.000	100	1	Layanan	1	1	
962	Layanan Umum	94.570.000	90.219.497	100	1	Layanan	1	1	
994	Layanan Perkantoran	13.455.432.000	12.031.398.997	100	1	Layanan	1	1	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	18.300.000	15.506.340	100					
954	Layanan Manajemen SDM	18.300.000	15.506.340	100	55	Layanan	55	1	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	169.092.000	141.580.800	100					
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	169.092.000	141.580.800	100	1	Dokumen	1	1	

B.2.4.2 Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Satker Balai Karantina Hewan Ikan da Tumbuhan Sulawesi Utara terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 04 Ekonomi dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah Sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional I
   - Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

   Pelaksanaannya di antaranya melalui 04 (Ekonomi) Program Prioritas, 03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, yang tersebar di BKHIT SULAWESI UTARA satuan Kerja dengan Pagu mencapai Rp773.853.000,00 dan Realisasi sebesar Rp217.715.852,00 dengan Rincian sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga	:	(127)) – Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi	:	(01)Badan Karantina Indonesia

Satker : (690893) Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Sulawesi Utara
Fungsi : (04) Ekonomi
Sub Fungsi : (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan)
Lokasi : Sulawesi Utara

Program/Kegiatan Proritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Ouput Strategis	Target	Capaian Output	%
04.Ekonomi	17.624.244.000	5.277.651.363	86,79%				
03.Pertanian,Kehutana Perikanan dan Kelautan	17.624.244.000	5.277.651.363	86,79%				
HA.Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.608.555.000	253.034.062	73,15%				
Sertifikasi Produk	2.453.961.000	1.798.664.781	73,3%				
Hasil Pemantauan	773.853.000	251.443.966	32,49%	Produk	3	3	100
Sertifikasi Kesehatan/Karantina	1.680.108.000	1.547.220.815	92,09%	Sertifikat	41300	41300	100
Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	154.594.000	109.524.701	70,85%	Laporan	1	1	100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp25.491.407.243,00 dan Rp26.718.321.587,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp-1.226.914.344,00 atau -4.59% apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan pada TA. 2025 satker tidak menerima dan mengelola anggaran 53 (Belanja Modal). Hal tersebut dikarenakan proses likuidasi transfer aset dari Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia untuk tahap terakhir sesuai dengan Berita Acara Serah Terima kedua belah pihak Kementerian/Lembaga sudah selesai diinput pada modul Aset SAKTI pada bulan Juni 2025.

Transfer aset tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia“ dan Pasal 47 ayat 5 poin a “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia”

Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Aset Lancar	205.453.864	9.304.464	196.149.400	2.108.12
Aset Tetap	25.285.953.379	26.668.822.198	-1.382.868.819	-5.19
Aset Lainnya	0	40.180.000	- 40.180.000	-100.00
Jumlah	**25.491.407.243**	**26.718.321.587**	**-1.226.914.344**	**-4.59**

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan**.** Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp205.453.864,00 dan Rp9.304.464,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp196.149.400 atau 2.108% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dikarenakan tiap pelaporan keuangan periode bulan berjalan masing-masing satuan kerja masih memiliki kas di bendahara pengeluaran berupa uang muka dari KPPN yang masih digunakan untuk operasional kantor sedangkan laporan akhir tahun kas tersebut bernilai normal nihil karena harus sudah dikembalikan ke kas negara. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Des 2025	Saldo Per 31 Des 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	15
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(75)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO	0	14.925
Persediaan	205.453.864	9.304.464
Jumlah	**205.453.864**	**9.319.389**

C.1.1 Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang Muka dari KPPN	0	0
TUP PNBP	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.2 Kas Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tabel Perbandingan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lancar	Saldo per 31 Des 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

C.1. 3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp205.453.864,00 dan Rp9.304.464,00 . yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp9,304,464, mutasi tambah sebesar Rp337,230,456, dan mutasi kurang sebesar Rp141,081,056 . Dokumen Utama sebanyak 6,253 Lembar senilai Rp9,304,464 tidak digunakan lagi karena suda menggunakan BEST TRUST, dan akan dilakukan pemusnahan terhadap barang tersebut.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Barang Konsumsi	205.453.864	9.304.464
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	**205.453.864**	**9.304.464**

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Aset Tetap Lainya.

Saldo Aset Tetap pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp25.285.953.379,00 dan Rp26.668.822.198,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-1.382.868.819,00 atau -5.19% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dikarenakan transfer aset tahap terakhir dari Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia telah selesai diinput pada modul SAKTI bulan Juni 2025. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo per 30 Juni 2025 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	11.460.619.400	11.460.619.400	0
2	Peralatan dan Mesin	17.590.644.589	17.359.342.189	231.302.400
3	Gedung dan Bangunan	14.889.758.388	14.739.908.388	149.850.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	521.501.500	521.501.500	0
5	Akumulasi Penyusutan	(18.416.335.005)	(17.412.549.279)	(1.003.785.726)
Jumlah		**26.046.188.872**	**26.668.822.198**	**-622.633.326**

C.2.1 Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Nilai Aset berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.460.619.400,00 yang dan Rp11.460.619.400,00. Nilai Tanah tersebut berasal dari Tranfer Masuk dari Kementerian Pertanian sesuai dengan BAST Barang Milik Negara Nomor : 4554/PL.310/A/XI/12/2024 dan11579/ PL.310/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 berupa :

Tabel Perbandingan Saldo Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo per 31 Des 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	11.460.619.400	11.460.619.400	0	0

Rincian Akumulasi Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	11.460.619.000
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2025	**11.460.619.000**

Tanah Persil

Saldo Tanah Persil pada BKHIT Sulawesi Utara (127.00.1700.690893.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar **Rp11.460.619.400** *(Sebelas Milyar Empat Ratus Enam puluh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah Rupiah)*. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp11.460.619.400** *(Sebelas Milyar Empat Ratus Enam puluh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah Rupiah)*, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar **Rp0** *(***Nihil***)*, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar **Rp0** *(*** Nihil ***)*.

Penjelasan Rincian Data Tanah adalah sebagai berikut:

B.1. *Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, 1 (satu) Sertipikat a.n. Republik Indonesia cq. Kementerian Pertanian); Jl. Girian Bitung*

B.2. *Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama, 1 (satu) Sertipikat a.n. Republik Indonesia cq. Kementerian Pertanian); Jl. Adipura Paniki Bawah, Manado, Jl. Fatmawati No. 21*

B.3. *Tanah Bangunan Kantor Permanen, 4 (empat) Sertipikat a.n. Republik Indonesia cq. Kementerian Pertanian). Jl. Mr Alex Maramis Link. III Manado, Jl. Yos Sudarso Bitung, Jl. Desa*

B.4. *Tanah Bangunan Kantor Permanen, 1 (satu) Sertipikat a.n. Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan Perikanan) di Meloanguane Talaud*

C. 2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp17.260.797.043,00 dan Rp17.359.342.189,00 Nilai Peralatan dan Mesin dan Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**17.590.644.589**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0.00
Transfer Masuk	0.00
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	17.359.342.189
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.830.699.180)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	439.096.845

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- masing sebesar Rp14.889.758.388,00 dan Rp14.739.908.388,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**14.889.758.388**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**14.889.758.388**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(242.830.602)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**1.395.363.998**

C. 2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp521.501.500,00 dan Rp521.501.500,00 . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**521.501.500**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**548.486.400**
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	(146.408.752)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**402.077.648**

C. 2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp-18.846.722.952,00 dan Rp-17.412.549.279,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.269.796.025	(2.830.699.180)	439.096.845
2	Gedung dan Bangunan	1.638.194.600	(242.830.602)	1.395.363.998
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.486.400	(146.408.752)	402.077.648
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**5.456.477.025**	**(3.219.938.534)**	**2.236.538.491**

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, dan Aset Lain-lain.
Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp40.180.000,00 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp-40.180.000,00 atau -100% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dikarenakan adanya transfer masuk dari Kementerian Pertanian dalam hal likuidasi aset.

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.500.000,00 dan Rp49.500.000,00

Tabel Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Des 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software Komputer	49.500.000	49.500.000	0	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BKHIT Sulut berupa *software* ataupun aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Penambahan Saldo ATB senilai Rp49.500.000,00 pada tahun 2025 didapat melalui transfer masuk atau pemindahan aset dari BKP Kelas I Manado ke BKHIT Sulut.

C. 3.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp40.180.000,00. Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 ini mengalami penuruan 100% dibanding per 31 Desember 2024 dikarenakan dana ini biasanya untuk mengakomodir pekerjaan yang belum terselesaikan di akhir tahun anggaran sedangkan untuk pertengahan tahun tidak bisa menggunakan dana tersebut. Berikut perbandingan saldo atas dana yang dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran) namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Dana yang dibatasi penggunaannya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku menggunkaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai PMK RI No.109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, dimana rekening tersebut digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Atas saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 tersebut pada awal tahun 2025 sudah dilakukan pembayaran dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan PMK RI No.109 Tahun 2023.

Adapun rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan Satker per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	0	40.180.000	(40.180.000)	(100)
TOTAL		**0**	**40.180.000**	**(40.180.000)**	**(100)**

C.3.3 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BKHIT Sulut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp330.501.546,00 dan Rp654.000,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Karantina Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Uraian Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	330.501.546	654.000	329.847.546	50.435.40

Berikut mutasi tambah kurang atas Aset Lain-Lain:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 Rp	Penambahan Rp	Saldo 31 Des 2025 Rp
Aset Lain-Lain	654.000	329.847.546	330.501.546

C.3.4 Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki BKHIT Sulut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- masing sebesar Rp380.001.546,00 dan -Rp50.154.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp510.000,00 dan Rp41.248.800,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.738.800,00 atau -98.76% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo per 31 Des 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	510.000	41.248.800	-40.738.800	-98.76
Total	**510.000**	**41.248.800**	-40.738.800	-98.76

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp510.000,00 dan Rp41.248.800,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Perbandingan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Dese 2025	Saldo 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang kepada Pihak Ketiga	510.000	41.248.800	-40.738.800	-98.76

Penjelasan Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang yang masih harus dibayar senilai Rp510.000,00 merupakan akrual belanja yang berasal dari transaksi tagihan daya dan jasa Air yaitu penggunaan di bulan Desember namun di bayarkan di Januari 2026

C.4 2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan, Utang Pada Pihak Ketiga sebesar Rp510.000,00 berupa tagihan air yang akan di bayarkan pada bulan berikutnya.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	0
Utang Pada Pihak Ketiga	510.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	0
Total	**510.000**

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.490.897.243,00 dan Rp-26.677.072.787,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.490.897.243,00 dan Rp26.677.072.787,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp-1.186.175.544,00 atau -4,45% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

Tabel Perbandingan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	25.490.897.243	26.677.072.787	-1.186.175.544	-4,45
Total	**25.490.897.243**	**26.677.072.787**	**-1.186.175.544**	**-4.45**

C.6 Catatan Penting Lainnya Neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.514.997.338,00dan Rp1.865.209.769,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2024. Hal ini disebabkan Karena BKHIT SULAWESI UTARA Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Pepress 45 TA.2024, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2025 . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.429.268	1.511.920	37,62
Penadapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	28.517.000	58.343.500	-104,5
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	189.992	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.121.746.069	1.286.909.357	-14,72
Pendapatan Jasa Lainnya	222.705.001	498.400.000	-123,79
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	139.615.000	19.840.000	85,78
Jumlah	**1.514.997.338**	**1.865.209.769**	**-23,11**

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp6.805.609.482,00 dan Rp6.277.286.614,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp528.322.868,00 atau 7,76 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh beban pegawai.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.004.985.620	3.347.608.543	14,19
Beban Pembulatan Gaji PNS	65.161	58.977	0,87
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	251.754.910	227.560.930	13,98
Beban Tunj. Anak PNS	76.233.196	69.040.952	15,09
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	21.600.000	22,22
Beban Tunj. Fungsional PNS	474.327.000	433.754.000	14,60
Beban Tunj. PPh PNS	29.495.425	28.929.370	0,68
Beban Tunj. Beras PNS	207.483.300	180.905.160	14,44
Beban Uang Makan PNS	648.234.000	493.907.000	11,00
Beban Tunjangan Umum PNS	56.305.000	16.445.000	52,26
Beban Gaji Pokok PPPK	458.387.900	321.571.720	6,61
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.348	6.708	-10,3

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	38.140.180	31.403.730	-4,30
Beban Tunjangan Anak PPPK	13.902.782	10.746.984	6.65
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	37.570.000	34.260.000	6,56
Beban Tunjangan Beras PPPK	41.496.660	31.647.540	4,51
Beban Uang Makan PPPK	100.566.000	60.201.000	15,28
Beban Tunjangan Umum PPPK	7.080.000	0	-1253,18
Beban Uang Lembur	278.659.000	940.267.000	
Beban Uang Lembur PPPK	55.716.000	27.372.000	0,00
Jumlah	**6.805.609.482**	**6.277.286.614**	**8,41**

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp131.776.592,00 dan Rp321.700.904,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	131.776.592	321.700.904	-59,038
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**131.776.592**	**321.700.904**	**-59,038**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.497.065.271,00 dan Rp5.247.997.293,00

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -14,309 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.745.485.582	2.680.391.971	-53,56
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	469.454.717	364.796.000	22,29
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.231.520	11.258.719	-55,69
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	141.626.000	119.184.000	15,85
Beban Bahan	395.268.811	277.356.150	29,83
Beban Langganan Listrik	324.990.754	377.851.728	-16,27

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Langganan Telepon	72.023.045	98.008.775	-36,08
Beban Langganan Air	19.982.600	16.234.700	18,76
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	516.282.839	453.616.950	12,14
Beban Sewa	709.608.900	542.422.300	23,56
Beban Jasa Profesi	24.897.900	15.700.000	36,94
Beban Jasa Lainnya	70.212.603	291.176.000	-314,71
Jumlah	**4.497.065.271**	**5.247.997.293**	**-16,70**

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1.100.625.410,00 dan Rp1.691.447.913,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 42,84 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.053.087	780.056.179	74,74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	818.415.423	746.668.944	-9,61
Beban Pemeliharaan Jaringan	85.156.900	164.722.790	48,30
Jumlah	**1.100.625.410**	**1.691.447.913**	**34,93**

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.588.670.237,00 dan Rp2.593.073.018

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30,7 persen disebabkan oleh efisiensi penghematan anggaran oleh Perpres No. 1 tahun 2025. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.344.460.437	197.053.087	85,3
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-8.940.200	0	0
Beban Perjalanan Dinas Tetap	208.230.000	818.415.423	-293,0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.920.000	85.156.900	-89,6
Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	0	1.827.66.620	0
Jumlah	**1.588.670.237**	**2.593.073.018**	30,7

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.663.413.159,00 dan Rp928.210.516,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.252.851.647	714.774.395	42,9
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	396.878.434	206.594.582	47,9
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.751.473	1.875.736	50,0
Beban Penyusutan Irigasi	4.595.293	2.297.647	50,0
Beban Penyusutan Jaringan	5.336.312	2.668.156	50,0
Jumlah	**1.663.413.159**	**928.210.516**	**44,2**

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.260.074.536	16.318.247.044	-14,43
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Yang Lalu	-1.515.012.338	-1.865.194.769	-23,11
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	350.229.460	27.418.527.076	-7728,73
Jumlah	**13.095.291.658**	**41.871.579.351**	**-219,7**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.677.072.787,00 dan Rp.0,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp-14.281.467.202,00 dan Rp-15.194.506.564,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yaitu sebagai berikut .

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E. 4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(Dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	**-**

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	**-**

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.095.291.658,00 dan Rp41.871.579.351,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2025

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.260.074.536
Diterima dari Entitas Lain	-1.515.012.338
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	350.229.460
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**13.095.291.658**

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp14.260.074.536,00 Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2025, sedangkan DDEL sebesar minus Rp-1.515.012.338,00 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari :

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp25.490.897.243,00 dan Rp26.677.072.787,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- SHR telah terbit

F. 2 Pengungkapan Lain-lain

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KPPN MANADO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 690893 - BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 13/02/26 1:38
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	16,350,479,000	16,350,479,000	0
2	Belanja	14,269,014,736	14,269,014,736	0
3	Pengembalian Belanja	-8,940,200	-8,940,200	0
4	Estimasi Pendapatan	3,261,130,000	3,261,130,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,515,012,338	1,515,012,338	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 10:09 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	15,000	(15,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(75)	75	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	14,925	(14,925)	(100.00)
Persediaan	205,453,864	9,304,464	196,149,400	2,108.12
JUMLAH ASET LANCAR	**205,453,864**	**9,319,389**	**196,134,475**	**2,104.59**
ASET TETAP				
Tanah	11,460,619,400	11,460,619,400	0	0.00
Peralatan dan Mesin	17,260,797,043	17,359,342,189	(98,545,146)	(0.57)
Gedung dan Bangunan	14,889,758,388	14,739,908,388	149,850,000	1.02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	521,501,500	521,501,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18,846,722,952)	(17,412,549,279)	(1,434,173,673)	8.24
JUMLAH ASET TETAP	**25,285,953,379**	**26,668,822,198**	**(1,382,868,819)**	**(5.19)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	49,500,000	49,500,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	40,180,000	(40,180,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	330,501,546	654,000	329,847,546	50,435.40
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(380,001,546)	(50,154,000)	(329,847,546)	657.67
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**40,180,000**	**(40,180,000)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**25,491,407,243**	**26,718,321,587**	**(1,226,914,344)**	**(4.59)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	510,000	41,248,800	(40,738,800)	(98.76)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**510,000**	**41,248,800**	**(40,738,800)**	**(98.76)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**510,000**	**41,248,800**	**(40,738,800)**	**(98.76)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,490,897,243	26,677,072,787	(1,186,175,544)	(4.45)
JUMLAH EKUITAS	**25,490,897,243**	**26,677,072,787**	**(1,186,175,544)**	**(4.45)**
JUMLAH EKUITAS	**25,490,897,243**	**26,677,072,787**	**(1,186,175,544)**	**(4.45)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**25,491,407,243**	**26,718,321,587**	**(1,226,914,344)**	**(4.59)**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(127) BADAN KARANTINA INDONESIA**

UNIT ORGANISASI : **(01) BADAN KARANTINA INDONESIA**

WILAYAH/PROVINSI : **(1700) SULAWESI UTARA**

SATUAN KERJA : **(690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 10:09 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS MUGIYANTO

NIP. 196902271992031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KARANTINA INDONESIA 127

ESELON I : BADAN KARANTINA INDONESIA 01

SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA 690893

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 10:08 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**3,261,130,000**	**1,515,012,338**	**(1,746,117,662)**	**46.46**	**3,191,130,000**	**1,865,194,769**	**(1,325,935,231)**	**58.45**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,261,130,000	1,515,012,338	(1,746,117,662)	46.46	3,191,130,000	1,865,194,769	(1,325,935,231)	58.45
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**3,261,130,000**	**1,515,012,338**	**(1,746,117,662)**	**46.46**	**3,191,130,000**	**1,865,194,769**	**(1,325,935,231)**	**58.45**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	16,350,479,000	14,260,074,536	(2,090,404,464)	87.22	16,641,318,000	16,318,247,044	(323,070,956)	98.06
1. Belanja Pegawai	6,849,046,000	6,805,609,482	(43,436,518)	99.37	6,311,051,000	6,277,286,614	(33,764,386)	99.46
2. Belanja Barang	9,501,433,000	7,454,465,054	(2,046,967,946)	78.46	10,169,767,000	9,880,463,325	(289,303,675)	97.16
3. Belanja Modal	0	0	0	0	160,500,000	160,497,105	(2,895)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KARANTINA INDONESIA 127

ESELON I : BADAN KARANTINA INDONESIA 01

SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA 690893

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 10:08 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**16,350,479,000**	**14,260,074,536**	**(2,090,404,464)**	**87.22**	**16,641,318,000**	**16,318,247,044**	**(323,070,956)**	**98.06**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Manado, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS MUGIYANTO
NIP. 196902271992031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(127) BADAN KARANTINA INDONESIA**

ESELON I : **(01) BADAN KARANTINA INDONESIA**

WILAYAH/PROVINSI : **(1700) SULAWESI UTARA**

SATUAN KERJA : **(690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 10:08 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,514,997,338	1,865,209,769	(350,212,431)	(18.776)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,514,997,338	1,865,209,769	(350,212,431)	(18.776)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,514,997,338	1,865,209,769	(350,212,431)	(18.776)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,805,609,482	6,277,286,614	528,322,868	8.416
Beban Persediaan	131,776,592	321,700,904	(189,924,312)	(59.038)
Beban Barang dan Jasa	4,497,065,271	5,247,997,293	(750,932,022)	(14.309)
Beban Pemeliharaan	1,100,625,410	1,691,447,913	(590,822,503)	(34.93)
Beban Perjalanan Dinas	1,588,670,237	2,593,073,018	(1,004,402,781)	(38.734)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(127) BADAN KARANTINA INDONESIA**

ESELON I : **(01) BADAN KARANTINA INDONESIA**

WILAYAH/PROVINSI : **(1700) SULAWESI UTARA**

SATUAN KERJA : **(690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 10:08 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,663,413,159	928,210,516	735,202,643	79.206
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(75)	75	(150)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,787,160,076	17,059,716,333	(1,272,556,257)	(7.459)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,272,162,738)	(15,194,506,564)	922,343,826	(6.07)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9,304,464)	0	(9,304,464)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,304,464	0	9,304,464	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9,304,464)	0	(9,304,464)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,281,467,202)	(15,194,506,564)	913,039,362	(6.009)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14,281,467,202)	(15,194,506,564)	913,039,362	(6.009)

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS MUGIYANTO

NIP. 196902271992031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 10:08 AM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26,677,072,787	0	26,677,072,787	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,281,467,202)	(15,194,506,564)	913,039,362	(6.01)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,095,291,658	41,871,579,351	(28,776,287,693)	(68.73)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,186,175,544)	26,677,072,787	(27,863,248,331)	(104.45)
EKUITAS AKHIR	25,490,897,243	26,677,072,787	(1,186,175,544)	(4.45)

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS MUGIYANTO

NIP. 196902271992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 10:09 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	205,453,864	0
0.0	131111	Tanah	11,460,619,400	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	17,260,797,043	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	14,889,758,388	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	76,404,000	0
0.0	134112	Irigasi	98,645,000	0
0.0	134113	Jaringan	346,452,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,229,478,155
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,305,295,824
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	72,652,527
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	39,059,984
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	200,236,462
0.0	162151	Software	49,500,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	330,501,546	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	330,501,546
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	49,500,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	510,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,260,074,536
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,515,012,338	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	350,229,460
0.0	391111	Ekuitas	0	26,677,072,787
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,429,268
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	28,517,000
3.0	425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	1,121,731,069
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	139,615,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	222,705,001
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,004,985,620	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	65,161	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	251,754,910	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	76,233,196	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	474,327,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	29,495,425	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	207,483,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	648,234,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	56,305,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	458,387,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 10:09 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,348	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	38,140,180	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	13,902,782	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	37,570,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	41,496,660	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	100,566,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,080,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	278,659,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	55,716,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,745,485,582	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	469,454,717	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,231,520	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	141,626,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	395,268,811	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	324,990,754	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	72,023,045	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	19,982,600	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	516,282,839	0
3.0	522141	Beban Sewa	709,608,900	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	24,897,900	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	70,212,603	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197,053,087	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	818,415,423	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	85,156,900	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,335,520,237	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	208,230,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,920,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,252,851,647	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	396,878,434	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,751,473	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	4,595,293	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,336,312	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	131,776,592	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	75
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	9,304,464	0
JUMLAH			**62,029,608,694**	**62,029,608,694**

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS MUGIYANTO

NIP. 196902271992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 10:09 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	14,260,074,536
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,515,012,338	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,429,268
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	28,517,000
3.0	425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	1,121,746,069
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	139,615,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	222,705,001
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,004,985,620	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65,161	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	251,754,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	76,233,196	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	474,327,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	29,495,425	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	207,483,300	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	648,234,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,305,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	458,387,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,348	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	38,140,180	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,902,782	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	37,570,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	41,496,660	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	100,566,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,080,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	278,659,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	55,716,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,745,485,582	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	469,454,717	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,231,520	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	141,626,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	395,268,811	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	267,545,336	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	324,990,754	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	72,023,045	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	20,541,400	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	516,282,839	0
3.0	522141	Belanja Sewa	709,608,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (690893) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 10:09 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	24,897,900	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	70,212,603	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197,053,087	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	818,415,423	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	85,156,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,344,460,437	0
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	208,230,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,920,000	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	8,940,200
JUMLAH			**15,784,027,074**	**15,784,027,074**

Keterangan :

FINAL

Manado, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS MUGIYANTO

196902271992031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 127**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**
ESELON I	**: 01**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1700**	**SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA	**: 690893**	**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/26 10:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/26 8:48 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,289,584,000	4,004,987,000	4,004,985,620	0	4,004,985,620	100	1,380
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,000	66,000	65,161	0	65,161	98.73	839
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	168,382,000	251,757,000	251,754,910	0	251,754,910	100	2,090
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,196,000	76,234,000	76,233,196	0	76,233,196	100	804
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,500,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	372,072,000	474,327,000	474,327,000	0	474,327,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	27,962,000	29,497,000	29,495,425	0	29,495,425	99.99	1,575
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	108,339,000	207,484,000	207,483,300	0	207,483,300	100	700
511129	Belanja Uang Makan PNS	529,846,000	663,055,000	648,234,000	0	648,234,000	97.76	14,821,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	49,810,000	56,305,000	56,305,000	0	56,305,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,645,736,000	5,788,912,000	5,774,083,612	0	5,774,083,612	99.74	14,828,388
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	271,242,000	458,393,000	458,387,900	0	458,387,900	100	5,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,000	9,000	7,348	0	7,348	81.64	1,652
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,128,000	38,141,000	38,140,180	0	38,140,180	100	820
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,048,000	13,903,000	13,902,782	0	13,902,782	100	218
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26,710,000	37,570,000	37,570,000	0	37,570,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,119,000	41,497,000	41,496,660	0	41,496,660	100	340
511628	Belanja Uang Makan PPPK	52,965,000	101,373,000	100,566,000	0	100,566,000	99.2	807,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	7,080,000	7,080,000	0	7,080,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	406,244,000	697,966,000	697,150,870	0	697,150,870	99.88	815,130
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,017,479,000	302,028,000	278,659,000	0	278,659,000	92.26	23,369,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	30,070,000	60,140,000	55,716,000	0	55,716,000	92.64	4,424,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,047,549,000	362,168,000	334,375,000	0	334,375,000	92.33	27,793,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,099,529,000	6,849,046,000	6,805,609,482	0	6,805,609,482	99.37	43,436,518
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,882,166,000	2,691,404,000	1,745,485,582	0	1,745,485,582	64.85	945,918,418
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	601,920,000	601,920,000	469,454,717	0	469,454,717	77.99	132,465,283
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000,000	16,667,000	7,231,520	0	7,231,520	43.39	9,435,480
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,264,000	146,100,000	141,626,000	0	141,626,000	96.94	4,474,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 127**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**
ESELON I	**: 01**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1700**	**SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA	**: 690893**	**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/26 10:09 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/26 8:48 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,644,350,000	3,456,091,000	2,363,797,819	0	2,363,797,819	68.4	1,092,293,181
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	316,820,000	443,029,000	395,268,811	0	395,268,811	89.22	47,760,189
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	316,820,000	443,029,000	395,268,811	0	395,268,811	89.22	47,760,189
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	428,065,000	275,826,000	267,545,336	0	267,545,336	97	8,280,664
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	428,065,000	275,826,000	267,545,336	0	267,545,336	97	8,280,664
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	480,000,000	380,871,000	324,990,754	0	324,990,754	85.33	55,880,246
522112	Belanja Langganan Telepon	126,000,000	82,092,000	72,023,045	0	72,023,045	87.73	10,068,955
522113	Belanja Langganan Air	30,000,000	22,524,000	20,541,400	0	20,541,400	91.2	1,982,600
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	653,000,000	537,730,000	516,282,839	0	516,282,839	96.01	21,447,161
522141	Belanja Sewa	886,315,000	727,036,000	709,608,900	0	709,608,900	97.6	17,427,100
522151	Belanja Jasa Profesi	26,300,000	31,500,000	24,897,900	0	24,897,900	79.04	6,602,100
522191	Belanja Jasa Lainnya	145,650,000	83,250,000	70,212,603	0	70,212,603	84.34	13,037,397
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,347,265,000	1,865,003,000	1,738,557,441	0	1,738,557,441	93.22	126,445,559
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197,846,000	197,276,000	197,053,087	0	197,053,087	99.89	222,913
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,073,440,000	986,234,000	818,415,423	0	818,415,423	82.98	167,818,577
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	149,532,000	99,532,000	85,156,900	0	85,156,900	85.56	14,375,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,420,818,000	1,283,042,000	1,100,625,410	0	1,100,625,410	85.78	182,416,590
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,958,617,000	1,911,322,000	1,344,460,437	8,940,200	1,335,520,237	69.87	575,801,763
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	352,230,000	218,520,000	208,230,000	0	208,230,000	95.29	10,290,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56,550,000	48,600,000	44,920,000	0	44,920,000	92.43	3,680,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,367,397,000	2,178,442,000	1,597,610,437	8,940,200	1,588,670,237	72.93	589,771,763
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,524,715,000	9,501,433,000	7,463,405,254	8,940,200	7,454,465,054	78.46	2,046,967,946
	JUMLAH BELANJA	17,624,244,000	16,350,479,000	14,269,014,736	8,940,200	14,260,074,536	87.22	2,090,404,464

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 127**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**
ESELON I	**: 01**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1700**	**SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA	**: 690893**	**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/01/26 10:09 AM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,429,268	0	2,429,268	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	2,429,268	0	2,429,268	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	180,000,000	28,517,000	0	28,517,000	15.84
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	180,000,000	28,517,000	0	28,517,000	15.84
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1,961,130,000	1,121,746,069	0	1,121,746,069	57.2
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	310,000,000	139,615,000	0	139,615,000	45.04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	2,271,130,000	1,261,361,069	0	1,261,361,069	55.54
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	810,000,000	222,705,001	0	222,705,001	27.49
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	810,000,000	222,705,001	0	222,705,001	27.49
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,261,130,000	1,515,012,338	0	1,515,012,338	46.46
	JUMLAH PENDAPATAN	3,261,130,000	1,515,012,338	0	1,515,012,338	46.46